TATA CARA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA OPERASI PASAR TERBUKA SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 17/41/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH, DAN LEMBAGA PERANTARA DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi repurchase agreement Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset

SBSN dalam mata uang Rupiah.

6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
7. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
8. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.
10. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
11. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana di-

maksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

12. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
13. Transaksi Repurchase Agreement SBSN Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut Repo SBSN OPT Syariah adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka OPT Syariah.
14. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
15. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia dan/atau transaksi pasar keuangan.
16. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
17. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
18. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan bersamaan.
19. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
20. Marjin Repo SBSN adalah tingkat keuntungan

(profit rate) dalam setahun (per annum) yang disepakati oleh para pihak yang melakukan Repo SBSN OPT Syariah.

II. KARAKTERISTIK REPO SBSN OPT SYARIAH

1. Repo SBSN OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan menggunakan akad al bai' (jual beli) yang disertai dengan janji (al wa'd) oleh Bank kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
3. Repo SBSN OPT Syariah dapat dilakukan pada setiap hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Jangka waktu Repo SBSN OPT Syariah paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
5. Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
6. Pelaksanaan lelang Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (fixed rate tender) dengan Marjin Repo SBSN ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (variable rate tender) dengan Marjin Repo SBSN diajukan Bank dan Lembaga Perantara.
7. Marjin Repo SBSN diperhitungkan pada saat setelmen second leg Repo SBSN OPT Syariah.
8. Persyaratan Bank yang dapat mengikuti Repo SBSN OPT Syariah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
9. Bank mengajukan Repo SBSN OPT Syariah

kepada Bank Indonesia untuk kepentingan diri sendiri.

10. Bank dapat mengajukan penawaran Repo SBSN OPT Syariah secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang telah ditetapkan.
11. Lembaga Perantara mengajukan penawaran Repo SBSN OPT Syariah untuk kepentingan Bank.
12. Persyaratan Lembaga Perantara adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Bank mengajukan Repo SBSN OPT Syariah setelah menandatangani Janji (wa'd) Untuk Membeli Kembali SBSN Dalam Rangka Repo SBSN Dengan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Dokumen Janji, yang telah dibubuhi materai cukup dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia. Contoh Dokumen Janji sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;
 - 2) fotokopi anggaran dasar Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; atau
 - 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan dae-

rah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;

- 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; dan
 - 5) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.
- b. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri :
 - 1) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusatnya yang memuat kewenangan pejabat untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO);
 - 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO;
 - 3) dalam hal penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya (hak substitusi); dan
 - 4) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.
 3. Penandatanganan Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan Repo SBSN OPT Syariah dengan Bank Indonesia.
 4. Dokumen Janji yang telah ditandatangani berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi Dokumen Janji dan/atau perubahan

Anggaran Dasar Bank atau peraturan daerah mengenai kewenangan Direksi Bank untuk mewakili Bank atau ketentuan internal Bank yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.

5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 disampaikan dengan surat pengantar kepada:

Direktur Eksekutif
Departemen Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jl. M.H Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

IV. PERSYARATAN DAN NILAI SBSN

1. SBSN milik Bank yang dapat di-repo-kan adalah:
 - a. SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek.
 - b. tercatat di BI-SSSS;
 - c. tidak sedang diagunkan; dan
 - d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat second leg Repo SBSN OPT Syariah.
2. Harga SBSN yang dapat di-repo-kan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.
3. Bank Indonesia menetapkan besarnya haircut untuk SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen Repo SBSN OPT Syariah (first leg).
4. Haircut merupakan faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan haircut dan mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem BI-ETP, BISSSS, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya.
6. Hak penerimaan imbalan atas SBSN yang di-repo-kan selama periode Repo SBSN OPT Syariah tetap merupakan milik Bank.

V. PENGUMUMAN DAN PENGAJUAN REPO SBSN OPT SYARIAH

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Repo SBSN OPT Syariah paling lambat

sebelum window time melalui Sistem BIETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya.

2. Pengumuman rencana lelang Repo SBSN OPT Syariah memuat antara lain:
 - a. sarana transaksi;
 - b. tanggal lelang;
 - c. jangka waktu dan tanggal jatuh waktu;
 - d. metode lelang;
 - e. target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender;
 - f. Marjin Repo SBSN, apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender;
 - g. jenis dan seri SBSN yang dapat di-repo-kan;
 - h. haircut;
 - i. window time; dan/atau
 - j. tanggal dan waktu setelmen.
3. Window time Repo SBSN OPT Syariah dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Pengajuan penawaran Repo SBSN OPT Syariah
 - a. Bank secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara mengajukan penawaran Repo SBSN OPT Syariah kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
 - b. Pengajuan setiap penawaran nilai nominal dari Bank dan Lembaga Perantara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Pengajuan penawaran Repo SBSN OPT Syariah antara lain meliputi:
 - 1) nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-repo-kan untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau
 - 2) nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-repo-kan dan Marjin Repo SBSN untuk lelang dengan metode variable rate tender, untuk masing-masing jangka waktu Repo SBSN OPT Syariah yang akan dilakukan.
 - d. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan setiap penawaran Marjin Repo SBSN dilakukan

dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).

- e. Bank dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Repo SBSN OPT Syariah yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- f. Bank dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

VI. PENETAPAN PEMENANG LELANG REPO SBSN OPT SYARIAH

1. Dalam hal lelang Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode fixed rate tender maka penetapan nilai nominal Repo SBSN OPT Syariah yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Bank dimenangkan seluruhnya;
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan Bank dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Dalam hal lelang Repo SBSN OPT Syariah dilakukan dengan metode variable rate tender, maka penetapan nilai nominal Repo SBSN OPT Syariah yang dimenangkan dihitung dengan cara:
 - a. Bank Indonesia menetapkan Marjin Repo SBSN terendah yang dapat diterima (stop out rate/SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan nilai nominal yang dimenangkan dengan cara:
 - 1) dalam hal Marjin Repo SBSN yang diajukan Bank lebih tinggi dari SOR yang ditetapkan, Bank yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Repo SBSN OPT Syariah yang diajukan; dan
 - 2) dalam hal Marjin Repo SBSN yang diajukan Bank sama dengan SOR yang ditetapkan maka Bank yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Repo SBSN OPT Syariah yang diajukan dengan perhitun-

gan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Repo SBSN OPT Syariah.

VII. PENGUMUMAN HASIL LELANG REPO SBSN OPT SYARIAH

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Repo SBSN OPT Syariah setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:

1. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BIETP, antara lain berupa nilai transaksi yang dimenangkan dan Marjin Repo SBSN; dan
2. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lainnya, antara lain berupa nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, SOR dan/atau rata-rata tertimbang Marjin Repo SBSN.

VIII. SETELMEN REPO SBSN OPT SYARIAH

1. Setelmen Repo SBSN OPT Syariah melalui BI-SSSS dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP.
2. Setelmen first leg
 - a. Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang Repo SBSN OPT Syariah.
 - b. Bank wajib memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk setelmen first leg.
 - c. Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang direpakan; dan
 - 2) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen first leg.
 - d. Nilai setelmen first leg dihitung sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai setelmen first leg} = \left[\left(\begin{matrix} \text{Nominal} \\ \text{SBSN yang} \\ \text{di-repo-kan} \end{matrix} \right) \times \left(\begin{matrix} \text{Harga} \\ \text{SBSN} \end{matrix} - \text{Haircut} \right) \right] + \begin{matrix} \text{Accrued} \\ \text{imbalan} \\ \text{SBSN} \end{matrix}$$

2) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai setelmen first leg} = \begin{matrix} \text{Nominal} \\ \text{SBSN yang} \\ \text{d-irepo-kan} \end{matrix} \times \left(\begin{matrix} \text{Harga} \\ \text{SBSN} \end{matrix} - \text{Haircut} \right)$$

Keterangan:

Harga : Harga SBSN sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP dan BI-SSSS pada tanggal transaksi.

Haircut : Haircut sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP dan BI-SSSS.

Accrued Imbalan : - Hak atas imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen first leg.
- Perhitungan hak atas imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (actual per actual).

e. Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan sebelum periode cut off warning Sistem BI-RTGS, sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Repo SBSN OPT Syariah.

f. Atas batalnya Repo SBSN OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.

g. Dalam hal pada lelang yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Repo SBSN OPT Syariah (first leg), dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

3. Setelmen second leg

a. Pada tanggal Repo SBSN OPT Syariah jatuh waktu (second leg), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.

b. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen second leg.

c. Setelmen second leg dilaksanakan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (gross to gross) sebagai berikut:

- 1) Setelmen Dana, dengan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen second leg; dan
- 2) Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang direpo-kan yang jatuh waktu.

d. Nilai setelmen second leg dihitung sebagai berikut :

$$\begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Setelmen} \\ \text{Second Leg} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Setelmen} \\ \text{first Leg} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Marjin} \\ \text{Repo} \end{matrix}$$

Keterangan:

Nilai Marjin Repo SBSN adalah penerimaan Bank Indonesia sesuai jangka waktu Repo SBSN OPT Syariah.

$$\text{Nilai Marjin Repo} = \begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Setelmen} \\ \text{first leg} \end{matrix} \times \text{Marjin Repo} \times \frac{\text{Jangka Waktu}}{360}$$

e. Dalam hal setelah terjadinya Repo SBSN OPT Syariah, tanggal Repo SBSN OPT Syariah jatuh waktu (second leg) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan Marjin Repo SBSN untuk hari libur dimaksud.

f. Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan

sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, BISSSS secara otomatis membatalkan Repo SBSN OPT Syariah jatuh waktu (second leg).

4. Kegagalan Setelmen Second Leg

- a. Dalam hal Bank gagal melakukan setelmen second leg, maka Repo SBSN OPT Syariah diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara outright oleh Bank.
- b. Perhitungan setelmen transaksi outright dan penggunaan harga SBSN transaksi outright sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

Nilai Setelmen.	
Penjualan SBSN outright	$= \left(\begin{matrix} \text{Nominal} & \times & \text{Harga} \\ \text{SBSN} & & \text{SBSN} \end{matrix} \right)$

2) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

Nilai Setelmen	
Penjualan SBSN Outright	$= \left(\begin{matrix} \text{Nominal} & \times & \text{Harga} \\ \text{SBSN} & & \text{SBSN} \end{matrix} \right) + \text{Accrued imbalan}$

Keterangan :

- Harga SBSN : Harga SBSN pada transaksi first leg.
- Accrued Imbalan : Hak atas imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen outright.

- c. Atas kegagalan setelmen second leg, Bank tetap membayarkan Marjin Repo SBSN kepada Bank Indonesia.
- d. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen second leg Repo SBSN OPT Syariah, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia mengkredit/mendebet Rekening Giro Rupiah dengan memperhitungkan:
 - a) accrued imbalan pada periode Repo SBSN OPT Syariah;
 - b) haircut yang masih menjadi hak Bank; dan

c) Marjin Repo SBSN yang harus dibayarkan oleh Bank.

- 2) Dalam hal terdapat imbalan yang diterima oleh Bank pada periode Repo SBSN OPT Syariah, pendebitan/pengkreditan Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) memperhitungkan imbalan yang diterima oleh Bank yang harus dikembalikan kepada Bank Indonesia.
- e. Atas batalnya Repo SBSN OPT Syariah jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.f Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen second leg Repo SBSN OPT Syariah pada hari yang sama, dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

- 1. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen Repo SBSN OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.2.e dan butir VIII.3.f, Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi Repo SBSN OPT Syariah yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- 2. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.3.f dan

dalam hal harga SBSN pada saat second leg lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi first leg dan harga pada transaksi second leg setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-repo-kan.

3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

X. KETENTUAN PERALIHAN

Transaksi Repo SBSN OPT Syariah yang dilakukan setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 14/32/DPM tanggal 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.

XI. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/32/DPM tanggal 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

LAMPIRAN

**JANJI (WA'D) UNTUK MEMBELI KEMBALI SBSN
DALAM RANGKA REPO SBSN DENGAN BANK INDONESIA**

No.

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (tanggal dalam angka), yang bertandatangan di bawah ini:

(Nama) : (Jabatan), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ... (tanggal dalam angka), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal

(tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal(tanggal dalam angka), Nomor, Tambahan Nomor (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar).

Atau jika berdasarkan Anggaran Dasarnya Direksi Bank harus mendapat persetujuan dari komisaris:

(Nama) : (Jabatan), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal dalam angka), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (tanggal dalam angka), Nomor, Tambahan Nomor, (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Dokumen Janji ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tertulis tanggal(tanggal dalam angka), bermeterai cukup yang dilekatkan pada Dokumen Janji ini.

Kata-kata surat persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa.

Atau jika Direksi Bank harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan pinjaman seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (vide Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas):

(Nama) : (Jabatan), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank, berdasarkan Pasal, Anggaran Dasarnya yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal dalam angka), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal (tanggal dalam angka), Nomor, Tambahan Nomor, (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Dokumen Janji ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal (tanggal dalam angka), sebagaimana ternyata dalam, yang dilekatkan dalam Dokumen Janji ini.

Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan surat kuasa dari Direksi:

(Nama) : (Jabatan), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor....., tanggal(tanggal dalam angka) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank, berkedudukan dan berkantor pusat di yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal(tanggal dalam angka) yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal dalam angka), Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor....., tanggal (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal dalam angka), Nomor....., Tambahan Nomor, (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar).

Atau jika Unit Usaha Syariah berbadan hukum asing:

(Nama) : (Jabatan), bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Power of Attorney tertanggal (tanggal dalam angka) Nomor dibuat di hadapan, Notaris, di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama, cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing), dan dalam hal ini bertindak

melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, alamat

Dengan ini berjanji untuk melakukan pembelian kembali SBSN yang dijual ke Bank Indonesia setiap kali melakukan transaksi Repo SBSN dengan Bank Indonesia. Jangka waktu pembelian kembali SBSN dan harga pembelian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Standing Facilities Syariah dan Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah.

DIREKSI BANK/ CEO/PEJABAT
BANK YANG DIBERI KUASA¹,

Meterai

(.....NAMA JELAS.....)

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER,
ttd.
DODDY ZULVERDI

diisi jabatan penandatanganan wa'd sesuai ketentuan butir III.2 SE Ekstern

(BN)

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2015, tanggal 30 Desember 2015)

DIRERTUR JENDERAL PAJAIK,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2013;
- b. bahwa objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dialihkan kewenangan

pemungutannya kepada pemerintah kabupaten/kota;

- c. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas ter-tib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengubah ketentuan mengenai struktur dan penyesuaian nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih sederhana dan mudah diterapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu